

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Provinsi Jawa Tengah

Sejak abad ke-7, banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah, yaitu : Kerajaan Budha Kalingga, dari Jepara yang dipimpin oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut prasasti Canggal pada tahun 732, Kerajaan Hindu lahir di Medang Kamulan, Jawa Tengah dengan Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Dibawah pemerintahan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, ia membangun Candi Rorojonggrang atau dikenal dengan Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Budha yang juga lahir di Jawa Tengah selama era Dinasti Syailendra, Mereka membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan dll.

Pada abad 16 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu, kerajaan Islam muncul di Demak, sejak itulah Agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Setelah kerajaan Demak runtuh, Djoko Tingkir anak menantu Raja Demak (Sultan Trenggono) memindahkan kerajaan Demak ke Pajang (dekat Solo). Dan menyatakan diri sebagai Raja Kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Adiwijaya. Selama pemerintahannya terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Perang yang paling besar adalah antara Sultan Adiwijaya melawan Aryo Penangsang. Sultan Adiwijaya menugaskan Danang Sutowijaya untuk menumpas pemberontakan Aryo Penangsang dan berhasil membunuh Aryo Penangsang. Dikarenakan jasanya yang

besar kepada Kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya memberikan hadiah tanah Mataram kepada Sutowijaya. Setelah Pajang runtuh ia menjadi Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dan bergelar Panembahan Senopati.

Perselisihan bertambah keruh setelah adanya campur tangan pemerintah Kolonial Belanda pada perselisihan keluarga raja tersebut. Pertikaian ini akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Gianti tahun 1755. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kerajaan yang lebih kecil yaitu Surakarta Hadiningrat atau Kraton Kasunanan di Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Kasultanan di Yogyakarta. Sampai sekarang daerah Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah propinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, yang menyatakan pembentukan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

2. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah

a. Visi Provinsi Jawa Tengah

“Jawa Tengah Berdikari Dan Semakin Sejahtera” (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

b. Misi Provinsi Jawa Tengah

Misi 1 : Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;

Misi 3 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

3. Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

a. Jumlah Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018, Jawa tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.490.835 Juta jiwa yang tersebar di 29 Kabupaten dan 6 Kota. Tiga Kabupaten/Kota dengan penduduk terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk sebanyak 1.796.004 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit dimiliki oleh Kota Magelang dengan jumlah penduduk sebanyak 121.474 ribu jiwa.

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini tentu menciptakan kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan tantangan bagi Pemerintah guna mengatur pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebagaimana data yang didapatkan

dari BPS Jawa Tengah sendiri terhitung meningkat sebesar 0,78 % pertahunnya dihitung dari tahun 2010-2017.

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 terhitung sebanyak 17.101.806 juta jiwa, dan Penduduk perempuan Provinsi Jawa Tengah terhitung sebanyak 17.389.029 juta jiwa. Total penduduk Jawa Tengah pada 2018 sendiri sebanyak 34.490.835 juta jiwa, yang menandakan komposisi penduduk perempuan lebih banyak dengan presentase 50,4 % dibanding penduduk laki-laki dengan presentase 49,6 %.

B. Profil Kabupaten Blora

1. Geografis

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km. Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². untuk

ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Blora

a. Sejarah Blora

Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah Kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan HARI JADI KABUPATEN BLORA. Adapun Bupati pertamanya adalah WILATIKTA.

3. Visi dan Misi Kabupaten Blora

a. Visi Kabupaten Blora

“Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

b. Misi Kabupaten Blora

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN, dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah lingkungan dan berkesinambungan
3. Meningkatkan iklim yang kondusif dan bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM);

4. Kondisi Demografis Kabupaten Blora

a. Jumlah Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora pada tahun 2017, Kabupaten Blora memiliki jumlah penduduk sebanyak 852.088 ribu jiwa yang tersebar dalam 16 kecamatan. kecamatan paling banyak penduduknya

adalah Kecamatan Blora dengan jumlah penduduk sebanyak 94.663 ribu jiwa, dan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bogorejo dengan jumlah penduduk 24.233 ribu jiwa.

b. Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki Kabupaten Blora pada tahun 2017 terhitung sebanyak 422.699 ribu jiwa, dan Penduduk perempuan Kabupaten Rembang terhitung sebanyak 436.166 ribu jiwa. Total penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2017 sendiri sebanyak 858.865 ribu jiwa, yang menandakan komposisi penduduk perempuan lebih banyak dengan presentase 50,8 % dibanding penduduk laki-laki dengan presentase 49,2 %. Berikut tabel Penduduk Kabupaten Blora berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2 1 : Jumlah penduduk Kabupaten Blora berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Usia	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin		
	L	P	Total
0-9	65.568	61.621	127.189
10-19	65.458	61.557	127.015
20-29	58.006	60.087	118.093
30-39	60.284	63.694	123.978
40-49	62.632	66.328	128.960
50-59	56.459	57.835	114.294

60-69	31.773	32.390	64.163
70+	22.519	32.654	55.173
Jumlah	422.699	436.166	858.865

Sumber : Blora dalam Angka 2018 (BPS Kabupaten Blora)

5. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Blora merupakan penduduk yang berpendidikan. Sebanyak 95.184 penduduk dapat menamatkan jenjang SD, penduduk yang mampu menyelesaikan sekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 76.232 penduduk. Serta yang mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 42.485 penduduk. Di kabupaten ini juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan hingga jenjang akademi diatas SMA (DI, DII, DII, dan S1) sebanyak 44.721 penduduk.

6. Kondisi dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Keuangan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Blora menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Blora, tercatat lebih dari 16,46 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 98,61 persen. (Blora Dalam Angka 2018, 2018)

b. Harga-Harga

Informasi tentang inflasi sangat penting bagi tolak ukur kestabilan perekonomian pada suatu daerah. Pada tahun 2017, tingkat inflasi di Kota Blora mencapai angka 2,98 persen, dimana lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Blora Dalam Angka 2018, 2018)

c. PDRB Kabupaten Blora Menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2017, sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Secara umum, ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh dua sektor utama, yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian dengan besar sumbangan terhadap PDRB masing-masing sebesar 24,12 persen dan 23,33 persen. (Blora Dalam Angka 2018, 2018)

d. Pendapatan Per-Kapita di Kabupaten Blora

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan pendapatan perkapita di Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 23,41 juta rupiah, tahun 2017

menjadi 25,28 juta rupiah atau naik sebesar 8 persen. (Blora Dalam Angka 2018, 2018)

7. Angka Partisipasi Masyarakat Kabupaten Blora Pada Pemilu Legislatif 2014

Hasil perolehan suara partai politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 di Kabupaten Blora.

Tabel 2.2 : Partisipasi masyarakat Kabupaten Blora pada Pemilu Legislatif 2014

NO	Partai Politik	DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	26.190	30.695	34.614
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.018	68.915	63.776
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	39.414	31.527	37.872
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	71.265	68.078	60.481
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	61.929	59.229	74.012
6	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	53.174	57.091	49.380
7	Partai Demokrat	45.999	47.852	87.720
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	15.525	10.016	10.247
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32.086	32.658	53.626
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	18.743	17.565	27.214
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.826	2.044	1.488
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2.531	2.842	4.716

Sumber : Blora Dalam Angka (Blora in Figures) 2018 halaman 34

Untuk perolehan suara sah anggota DPRD kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Blora, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak yaitu 87.720 suara sah. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Blora dalam memilih sangat besar pada pemilu legislatif tahun 2014 tersebut, yaitu tercatat mencapai 71,61 persen dengan rata-rata presentase pemilih golput sebanyak 28,39 persen.

C. Profil Kabupaten Rembang

1. Geografis

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten paling timur di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di bagian utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di bagian timur, Kabupaten Blora di bagian selatan dan Kabupaten Ptai di bagian barat. Kabupaten Rembang secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak. Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058

hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Rembang

Rembang di peroleh dari sebuah manuskrip/tulisan tidak di terbitkan oleh Mbah Guru. Di sebutkan antara lain :”....kira-kira tahun Syaka 1336, ada orang Campa Banjarmati berjumlah delapan keluarga yang pandai membuat gula tebu ketika ada di negaranya.....”. Orang-orang tadi pindah untuk membuat gula merah yang tidak dapat di patahkan itu, berangkatnya melalui lautan menuju arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya tumbuh tak teratur pohon bakau. Kepindahannya itu di pimpin oleh kakek Pow Ie Din ; setelah mendarat kemudian mengadakan doa dan semedi, kemudian di mulai menebang pohon bakau tadi yang kemudian di teruskan oleh orang-orang lainnya. Tanah lapang itu kemudian dibuat tegalan dan pekarangan serta perumahan yang selanjutnya menjadi perkampungan itu dinamakan kampung : KABONGAN, mengambil kata dari sebutan pohon bakau, menjadi Ka-bonga-an (Kabongan). ...Pada suatu hari saat fajar menyising di bulan Waisaka, orang-orang akan memulai ngrembang (mbabat, Ind : memangkas) tebu. Sebelum di mulai mbabat di adakan upacara suci Sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun yang akan di kepras/ di pangkas dua pohon, untuk tebu “Penganten”. Upacara pengeprasan itu dinamakan “ngRembang sakawit”...begitu tadi asal mulainya kata : “ngRembang”, sampai di jadikan nama Kota Rembang hingga saat ini.., Menurut Mbah Guru ,

upacara ngRembang sakawit ini di laksanakan pada hari Rabu Legi, saat dinyanyikan Kidung, Minggu Kasadha, Bulan Waisaka, Tahun Saka 1337 dengan Candra Sengkala : Sabda Tiga Wedha Isyara.

3. Visi dan Misi Kabupaten Rembang

a. Visi Kabupaten Rembang

“Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”.

b. Misi Kabupaten Rembang

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas mengembangkan budaya politik, lokal pemerintahan, serta sosial, meningkatkan dan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

4. Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

a. Jumlah Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang pada tahun 2016, Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk sebanyak 626.136 ribu jiwa yang tersebar dalam 14 kecamatan. Kecamatan paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk sebanyak 90.274 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunem dengan jumlah penduduk 23.948 ribu jiwa.

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan Kabupaten Rembang sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini tentu menciptakan kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan tantangan bagi Pemerintah guna mengatur pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang sebagaimana data yang didapatkan

dari BPS Kabupaten Rembang sendiri terhitung meningkat sebesar 0,88 % pertahunnya dihitung dari tahun 2010-2016. Kecamatan Rembang menjadi sub-daerah paling tinggi tingkat pertumbuhan penduduknya dengan angka 1,13 %, dan Kecamatan Bulu menjadi daerah yang paling rendah tingkat pertumbuhan penduduknya dengan angka 0,58 %.

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki Kabupaten Rembang pada tahun 2017 terhitung sebanyak 313.375 ribu jiwa, dan Penduduk perempuan Kabupaten Rembang terhitung sebanyak 315.526 ribu jiwa. Total penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2017 sendiri sebanyak 628.901 ribu jiwa, yang menandakan komposisi penduduk perempuan lebih banyak dengan presentase 50,2 % dibanding penduduk laki-laki dengan presentase 49,8 %. Berikut tabel Penduduk Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Penduduk Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Usia	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin		
	L	P	Total
0-9	47.862	44.734	92.596
10-19	51.846	48.588	100.434
20-29	50.858	48.888	99.746
30-39	45.994	47.962	93.956
40-49	45.027	46.432	91.459

50-59	38.668	39.101	77.769
60-69	21.126	21.154	42.280
70+	11.994	18.667	30.661
Jumlah	313.375	315.526	628.901

Sumber : Rembang Dalam Angka 2017

5. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang merupakan penduduk yang berpendidikan. Sebanyak 277.302 penduduk dapat menamatkan jenjang SD. Penduduk yang mampu menyelesaikan sekolah tingkat SMP sebanyak 161.845 penduduk. Serta yang mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 105.728 penduduk.

6. Kondisi dan Perkembangan Ekonomi

a. Keuangan

APBD Rembang tahun 2017 mencerminkan tata kelola keuangan daerah sepanjang tahun 2017. Pendapatan daerah yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,7 Trilyun, atau meningkat 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sumbangan terbesar berasal dari dana perimbangan yang mencapai angka Rp 927,6 Milyar atau setara dengan 59,81% pendapatan secara keseluruhan. (Rembang Dalam Angka 2018, 2018)

b. Harga-Harga

Inflasi di Kota Rembang pada tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015-2017. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli . Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017, penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Rendahnya andil inflasi transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tidak terlepas dari kebijakan penurunan harga BBM pada Januari 2015. (Rembang Dalam Angka 2018, 2018)

c. PDRB Kabupaten Rembang

Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2014-2017 menunjukkan trend terus meningkat, dan pertumbuhan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mencapai 6,19%. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,19% tersebut, 2,29% nya berasal dari pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kedua lapangan usaha tersebut. Pertumbuhan lapangan usaha industri didorong oleh pertumbuhan

produksi industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian Rembang. (Rembang Dalam Angka 2018, 2018)

d. Pendapatan Per-Kapita

Pada Tahun 2017 rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan untuk makanan sebesar 444.617 rupiah dan 793.736 rupiah untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Rembang terlihat tidak merata. Terdapat 94,47% rumah tangga berpengeluaran minimal sebesar 300.000 rupiah per kapita perbulan, sedangkan 0,12% rumah tangga mempunyai pengeluaran dibawah 200.000 rupiah per kapita per bulan. (Rembang Dalam Angka 2018, 2018)

7. Angka Partisipasi Masyarakat Kabupaten Rembang Pada Pemilu Legislatif 2014

Hasil perolehan suara partai politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.4 : Partisipasi Masyarakat Kabupaten Rembang pada Pemilu Legislatif 2014

NO	Partai Politik	DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	20.959	20.413	29.631
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	51.770	38.746	47.247
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12.271	12.718	21.932
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	39.248	37.046	40.790
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	30.730	20.230	27.221

6	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	45.635	46.228	37.123
7	Partai Demokrat	29.038	41.896	64.491
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	14.378	14.718	20.084
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	51.942	50.657	73.012
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10.966	12.227	18.196
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.953	2.140	5.084
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.435	1.385	2.129

Sumber : Rembang Dalam Angka 2017

Untuk perolehan suara sah anggota DPRD kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Rembang, PPP memperoleh suara terbanyak yaitu 73.012 suara sah. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Blora dalam memilih sangat besar pada pemilu legislatif tahun 2014 tersebut, yaitu tercatat mencapai 84,24 persen dengan rata-rata presentase pemilih golput yang rendah yaitu sebanyak 15,75 persen.

D. Profil Kabupaten Pati

1. Geografis

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak di 644'56,80" LS 11102'06,96" BT dengan luas wilayah keseluruhan 1.419,07 km yang terbagi menjadi 21 Kecamatan dan 405 Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus

dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Pati

Sejarah Kabupaten Pati berpangkal dari beberapa gambar yang terdapat pada Lambang Daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1971 yaitu gambar yang berupa: "keris rambut pinutung dan kuluk kanigara". Menurut cerita rakyat yang terdapat juga pada kitab Babat Pati dan kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu "keris rambut pinutung dan kuluk kanigara" merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barangsiapa yang memiliki dua pusaka tersebut, akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmayana pembesar dari Majasemi andalan Kadipaten Carangsoka.

3. Visi dan Misi Kabupaten Pati

a. Visi Kabupaten Pati

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik)”

b. Misi Kabupaten Pati

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
(pendidikan akhlak dan budi pekerti);

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. (pendidikan dan kesehatan);
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. (pengentasan kemiskinan);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. (tata kelola pemerintahan yang baik);
5. Meningkatkan pemberdayaan umkm dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. (lapangan kerja);
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. (daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi);
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah. (infrastruktur daerah);
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (lingkungan hidup).

4. Kondisi Demografis Kabupaten Pati

a. Jumlah Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati pada tahun 2016, Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.239.989 jiwa yang tersebar dalam 21 kecamatan. Kecamatan paling banyak penduduknya

adalah Kecamatan Pati dengan jumlah penduduk sebanyak 107.028 ribu jiwa. Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunungwungkal dengan jumlah penduduk 36.012 ribu jiwa.

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan Kabupaten Pati sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak begitu besar seperti dua kabupaten diatas. Hal ini tentu menciptakan kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan tantangan bagi Pemerintah guna mengatur pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati sebagaimana data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Pati sendiri terhitung meningkat sebesar 0,58 % pertahunnya dihitung dari tahun 2015-2016. Kecamatan Margorejo menjadi sub-daerah paling tinggi tingkat pertumbuhan penduduknya dengan angka 1,49 %, dan Kecamatan Gunungwungkal menjadi daerah yang paling rendah tingkat pertumbuhan penduduknya dengan angka 0,12 %.

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki Kabupaten Pati pada tahun 2016 terhitung sebanyak 600.723 ribu jiwa, dan Penduduk perempuan Kabupaten Pati terhitung sebanyak 639.266 ribu jiwa. Total penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2017 sendiri sebanyak 1.239.989 juta jiwa, yang menandakan komposisi penduduk perempuan lebih banyak dengan presentase 51,6 % dibanding penduduk laki-laki dengan presentase 48,4 %. Berikut tabel Penduduk Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Penduduk Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Usia	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin		
	L	P	Total
0-9	94.998	89.908	184.906
10-19	99.108	96.724	195.832
20-29	83.612	90.158	173.770
30-39	84.957	94.681	179.638
40-49	89.184	96.855	186.039
50-59	75.962	79.477	155.439
60-69	45.121	50.900	96.021
70+	27.781	40.563	68.344
Jumlah	600.723	639.266	1.239.989

Sumber : Pati Dalam Angka 2017

5. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pati merupakan penduduk yang berpendidikan. Sebanyak 332.441 penduduk tamat SD, penduduk yang mampu menyelesaikan sekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 203.175 penduduk, dan yang mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 151.946 penduduk. Di kabupaten ini juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan hingga jenjang akademi, Strata 1 dan Starata 2 sebanyak 34.118 penduduk.

6. Kondisi dan Perkembangan Ekonomi

a. Keuangan

Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pati pada 2017, dengan pendapatan Pemerintah sebesar 2,747 Triliun dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 2,626 Triliun. (Pati Dalam Angka 2018, 2018)

b. Harga-Harga

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah besaran angka yang menunjukkan perbandingan dengan tahun dasar. Angka yang diperbandingkan adalah nilai konsumsi rumah tangga, sedangkan tahun dasar adalah angka nilai konsumsi rumah tangga (dari hasil survei) yang menjadi patokan/dasar untuk dibandingkan dengan angkaangka selanjutnya, lazimnya angka tahun dasar dibuat 100. Dari data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Pati, IHK paling besar yang didapatkan Kabupaten Pati sebesar 142.48 dan paling rendah didapatkan pada tahun 2016 112,98 terhitung mulai tahun 2012-2017. (Pati Dalam Angka 2018, 2018)

Informasi tentang inflasi sangat penting bagi tolak ukur kestabilan perekonomian pada suatu daerah. Pada tahun 2017, tingkat inflasi di Kabupaten Pati mencapai angka tertinggi pada bulan januari sebanyak 1,30, dan mencapai angka terendah pada bulan Juli dengan angka -0,37. (Pati Dalam Angka 2018, 2018)

c. PDRB Kabupaten Pati

PDRB Kabupaten Pati 2017 atas dasar harga yang berlaku sebesar 36,2 Triliun dan berdasarkan harga konstan sebesar 27,3 Triliun dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,06 persen. (Pati Dalam Angka 2018, 2018)

d. Pendapatan Per-Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Namun demikian, besarnya PDRB per kapita belum mencerminkan pendapatan penduduk yang sebenarnya, akan tetapi hanya menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu PDRB per kapita tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,9 persen dari tahun 2013 menjadi sekitar 23,2 juta rupiah, tahun 2015 naik sebesar 10,7 persen menjadi sekitar 25,67 juta rupiah, dan pada tahun 2016 naik sebesar 5,7 persen menjadi 27.134.604. (Pati Dalam Angka 2017, 2017)

7. Angka Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pati Pada Pemilu Legislatif 2014

Hasil perolehan suara partai politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 di Kabupaten Pati.

Tabel 2.6 : Partisipasi masyarakat Kabupaten Pati pada Pemilu Legislatif 2014

NO	Partai Politik	DPR	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	37.316	38.677	46.270
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	74.147	67.327	87.181
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	38.817	36.116	58.027
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	143.110	116.685	117.644
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	86.541	34.980	64.677
6	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	112.545	149.169	112.599
7	Partai Demokrat	52.121	86.404	76.972
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	29.809	12.082	16.604
9	Partai Persatuan Pembangunan	21.327	21.054	45.818
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	29.076	27.789	64.462
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	7.251	11.593	17.492
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	10.501	13.586	4.965

Sumber : Pati Dalam Angka 2017

Untuk perolehan suara sah anggota DPRD kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pati, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak yaitu 149.169 suara sah. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pati dalam memilih sangat besar pada pemilu legislatif tahun 2014 tersebut, yaitu tercatat mencapai 73,38 persen dan tingkat golput sebanyak 26,62 Persen.

E. Komparasi Deskripsi Objek Penelitian

a. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, Kabupaten Pati menjadi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara ketiga kabupaten lainnya yaitu sebanyak 1.239.989 jiwa. Kabupaten Blora menjadi terbanyak kedua dengan penduduk sebanyak 852.088 jiwa, dan Kabupaten Rembang sebanyak 626.136 jiwa. Ketiga Kabupaten sama-sama memiliki komposisi penduduk berjenis perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Selain itu persebaran penduduk pada ketiga Kabupaten paling banyak berada pada wilayah pusat kota, seperti Kecamatan Blora 94.663 jiwa, Kecamatan Rembang 90.274 jiwa, dan Kecamatan Pati 107.028 jiwa.

b. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data BPS, masyarakat Kabupaten Pati terdiri dari lulusan SD sebanyak 332.441 penduduk, lulusan SMP sebanyak 203.175 penduduk, lulusan SMA sebanyak 151.946 penduduk, dan lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 34.118, menjadikan Kabupaten Pati sebagai Kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dari ketiga Kabupaten. Selanjutnya ada Kabupaten Rembang dengan lulusan SD sebanyak 277.302 penduduk, lulusan SMP sebanyak 161.845 penduduk, lulusan SMA sebanyak 105.728 penduduk. Dan yang terakhir Kabupaten Blora dengan lulusan SD sebanyak 95.184 Penduduk, lulusan SMP sebanyak 76.232 Penduduk, lulusan SMA sebanyak 42.485 penduduk, dan lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 44.271 Penduduk.

Walaupun Kabupaten Pati secara angka dinilai paling tinggi tingkat pendidikannya, tetapi angka putus sekolah sejak SD pada Kabupaten Pati paling tinggi dan mencapai 73.285 penduduk tidak menamatkan pendidikannya. Berbeda dengan data yang didapat untuk Kabupaten Rembang dan Kabupaten, dimana hanya ada ratusan atau puluhan siswa saja yang belum menamatkan jenjang pendidikan SD, seperti Kabupaten Blora dengan angka putus sekolah sejak SD mencapai 786 penduduk, dan Kabupaten Rembang dengan angka putus sekolah mencapai 286 Penduduk.

c. Angka Partisipasi Pada Pemilihan Legislatif 2014

Berdasarkan data BPS dari masing-masing Kabupaten tingkat partisipasi masyarakat dari ketiga Kabupaten pada Pileg 2014 rata-rata mencatatkan angka partisipasi mencapai 75%, dengan angka partisipasi paling tinggi ada pada Kabupaten Blora yang mencapai 84,24 % diikuti angka golput paling kecil diantara dua Kabupaten lainnya yaitu 15,75 %. Selanjutnya diikuti Kabupaten Pati dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 73,38 % dan angka golput yang mencapai 26,62%. Selanjutnya Kabupaten Rembang dengan tingkat partisipasi paling buncit diantara ketiga Kabupaten dengan angka partisipasi mencapai 71,61 Persen dan dengan rata-rata pemilih golput sebanyak 28,39%. Dari data diatas menandakan partisipasi masyarakat pada Pileg 2014 diantara tiga Kabupaten lokasi penelitian paling baik ada pada Kabupaten Pati.